

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI SINERGI PROGRAM PUAP DENGAN DESA MANDIRI PANGAN

Optimizing Rural Community Empowerment Through Integrating PUAP and Demapan Programs

Valeriana Darwis dan I Wayan Rusastra

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor, 16161*

ABSTRACT

Community empowerment programs with the main objective to alleviate rural poverty principally have some similarities. It is in the cases of PUAP and Demapan programs. The similarities of both programs are: they are located in rural areas, implemented by community groups, supported by agricultural and non-agricultural capital programs as well as rural financial institutions, and facilitated by agricultural extension workers and technical advisers. The achievements of the programs need some improvement through better integration of the PUAP activities with Demapan program. Integration of both programs include: (1) determination of the villages for Demapan program; (2) internal arrangement of the related institutions; (3) infrastructure enhancement to alleviate poverty; and (4) synergizing implementation of both programs. Acceleration of agricultural and rural development for poverty alleviation will be achieved through optimizing all of the aspects.

Key words: *community empowerment, PUAP, and Demapan*

ABSTRAK

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat pada program PUAP dan Demapan. Adapun persamaannya antara lain : sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping. Dalam pelaksanaannya program tersebut masih banyak mengalami permasalahan dan untuk mengatasinya diperlukan koordinasi dengan cara mensinergikan program PUAP dengan Demapan. Sinergi dan integritasi kedua program mencakup beberapa aspek, yaitu : (1) diawali dengan sinergi data, pemilihan desa penerima program; (2) penataan internal kelembagaan program; (3) pemantapan pengembangan infrastruktur dengan sasaran akselerasi pengentasan kemiskinan; dan (4)antisipasi implementasi sinergi kedua program di lapangan. Dengan mengoptimalkan empat aspek tersebut, diharapkan akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.

Kata kunci : *pemberdayaan masyarakat, PUAP dan Demapan*

PENDAHULUAN

Pertanian perdesaan saat ini dihadapkan pada tiga masalah besar yaitu lemahnya modal sosial, kemiskinan, dan kerusakan sumberdaya pertanian (Pranadji, 2004). Salah satu kebijakan holistik untuk mengatasinya adalah implementasi program pemberdayaan masyarakat desa yang mengarah kepada kemandirian, kesinambungan dan keberlanjutan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah lama didengungkan sejak dikenalnya perencanaan *bottom up* yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam seluruh rangkaian pembangunan. Pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek untuk mengenali permasalahan dan ikut dalam perencanaan program akan menghasilkan kemandirian yang tinggi (Mubyarto, 1984 ; Sajogyo, 1982).

Banyak program parsial sektoral yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat perdesaan. Pada umumnya program dan proyek yang digulirkan dalam bentuk bantuan fisik kepada masyarakat, baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Dalam kenyataannya, sebagian besar proyek tidak mencapai tujuan secara maksimal dan tidak berkelanjutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut (Rahayu, 2006), antara lain : (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan; (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung; (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana; (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang mendukung keberlanjutan proyek.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Bahrein (2010) dimana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan secara parsial sektoral dengan membentuk kelembagaan baru. Kelembagaan baru ini bersifat “*top down*”, sehingga merusak tatanan kelembagaan yang ada dan umumnya keberlanjutan kelembagaan baru tersebut sangat rendah. Desa dan masyarakat diposisikan sebagai obyek pembangunan dengan partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Hal ini menjadi penyebab tumbuhnya perasaan apatis masyarakat desa karena dianggap kurang kompeten untuk mengelola desanya sendiri.

Dalam percepatan transformasi struktural dan pertumbuhan inklusif pembangunan pertanian dan perdesaan (Timmer, 2006 ; Henderson, 2007 ; IFPRI dan ADB, 2007) menyarankan beberapa kebijakan strategis dalam sebuah program, yaitu : (1) fokus pada pembangunan pertanian dan perdesaan tanpa mengabaikan pertumbuhan sektor perkotaan; (2) percepatan integrasi pasar tenaga kerja pertanian dan non-pertanian dengan dukungan perbaikan pasar finansial; (3) perbaikan kapasitas dan akses ekonomi penduduk miskin melalui investasi perdesaan dan migrasi tenaga kerja; (4) perbaikan inovasi teknologi rantai pasok; (5) investasi infrastruktur dan sistem komunikasi untuk mengurangi disparitas

spasial dan percepatan integrasi desa-kota; dan (6) fasilitas jaring pengaman sosial dan perbaikan status pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin.

Sudah banyak program pemberdayaan dalam rangka mengurangi penduduk miskin yang dilaksanakan pemerintah diantaranya : Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI), *Participatory Integrated Development of Rainfed Agriculture* (PIDRA), Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani), Program Desa Mandiri Pangan (Demapan), dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP).

Berdasarkan uraian diatas tulisan ini menganalisis antisipasi integrasi program PUAP dengan Demapan, menjadi satu program yang bersinergi dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mengoptimalkan pemberdayaan di tingkat masyarakat perdesaan.

PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN

Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) merupakan program aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas aparat desa untuk mengakomodasikan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam : (1) meningkatkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan; (2) meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat; (3) meningkatkan mutu dan keamanan pangan desa; (4) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat; dan (5) meningkatkan kualitas penanganan masalah pangan.

Ada sepuluh alasan melakukan pengembangan program pemberdayaan masyarakat perdesaan (BKP,2009) yaitu : (1) masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang disebabkan oleh keterbatasan penguasaan sumberdaya lahan; (2) masih adanya kemiskinan struktural, sehingga meskipun telah berusaha tapi pendapatan yang diperoleh belum memenuhi kebutuhan keluarga; (3) minimnya sarana dan prasarana (pengairan, jalan desa, sarana usahatani, air bersih, listrik dan pasar); (4) terbatasnya pengetahuan tentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman; (5) belum optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan masyarakat/kelompok tani; (6) terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga permodalan; (7) rendahnya akses terhadap lembaga pemasaran; (8) terbatasnya akses teknologi dan informasi; (9) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; dan (10) terbatasnya lapangan pekerjaan di perdesaan.

Program Demapan dalam tataran operasional terkait dengan upaya memantapkan program pemberdayaan kelompok miskin (kelompok afinitas),

mensinergikan dan mengintegrasikannya dengan pembangunan ekonomi perdesaan. Dengan demikian pembangunan Demapan membutuhkan dukungan lintas sektoral dalam pemberdayaan kelompok dan pembangunan di tingkat desa. Pembangunan di tingkat kelompok diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan akses ekonomi (kesempatan kerja dan berusaha) kelompok miskin. Sementara itu pembangunan perdesaan diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan. Prinsip dasarnya adalah kemiskinan tidak mungkin akan dientaskan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi perdesaan, sebagai syarat kecukupan dalam pengentasan kemiskinan.

Aspek Intertemporal Demapan

Untuk tercapainya tujuan Demapan program dirancang dalam kurun waktu 4 tahun, melalui empat tahapan yaitu : (1) tahap persiapan, meliputi seleksi desa rawan pangan dan pembentukan kelompok KK miskin; (2) tahap penumbuhan, mulai adanya usaha produktif, pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD), berfungsinya posyandu dan bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana wilayah perdesaan; (3) tahap pengembangan, adanya perkembangan ekonomi produktif, peningkatan modal LKD, pengembangan sistem ketahanan pangan; (4) tahap kemandirian, adanya peningkatan dinamika kelompok dan usaha ekonomi produktif, adanya jaringan kemitraan, berfungsinya LKD sebagai layanan modal dan berfungsinya Tim Pangan Desa dalam mengkoordinasikan program lintas sektoral.

Koordinasi Program dan Kelembagaan Demapan

Program Demapan dirumuskan oleh kelompok kerja (pokja) yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program aksi secara berjenjang dimulai dari : (i) tingkat desa yang terdiri dari kepala desa dan Tim Pangan Desa ; dan (ii) tingkat kabupaten, provinsi dan pusat yang menangani ketahanan pangan.

Penetapan Desa Mandiri Pangan berdasarkan kriteria : (1) desa rawan pangan yang minimal KK miskin 30 persen dari penduduk desa yang disurvei melalui Data Dasar Rumah Tangga (DDRT); (2) memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang belum dikembangkan; (3) aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi dan kesediaan menerima program yang diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap implementasi program dilapangan.

Kelembagaan yang ada dalam program Demapan adalah : (1) kelompok afinitas, sebagai penerima program; (2) tenaga pendamping yang bertugas membina kelompok afinitas; (3) Tim Pangan Desa yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok afinitas, PKK dan kader gizi yang

nantinya bertugas membina kelompok afinitas dan mengkoordinasikan kegiatan lintas sektoral; (4) Lembaga Keuangan Desa yang nantinya bertugas mengelola masalah keuangan dan usaha kelompok afinitas.

Kinerja Program Demapan

Secara umum kinerja program Demapan dalam derajat tertentu telah menunjukkan beberapa keberhasilan (Rusastra *et al.*, 2008) yaitu : (1) infrastruktur tersedia dari lintas sektor, meskipun belum sesuai dengan kebutuhan; (2) kelompok afinitas dalam batas-batas tertentu telah berhasil diberdayakan melalui pelatihan, sekolah lapang dan studi banding ke berbagai tempat; (3) Sekolah Lapang (SL) sudah berjalan dengan baik sesuai kebutuhan, SL yang masih diperlukan adalah SL kelembagaan finansial, SL pemasaran hasil, SL kewirausahaan; (4) aksesibilitas terhadap pasar input dan output makin baik; (5) aksesibilitas terhadap komunikasi dan informasi juga makin baik dengan adanya prasarana telpon; (6) Program Demapan telah meningkatkan kemauan dan kemampuan kelompok afinitas secara signifikan; (7) keberhasilan pemerintah desa dan kabupaten dalam membangun persepsi dan kesepahaman bahwa dana Demapan adalah dana abadi, sehingga pengelolaan dilakukan dengan baik.

Hasil evaluasi dampak program penanggulangan kemiskinan sektor pertanian di delapan desa di dua provinsi (Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat), salah satu yang dianalisis adalah pelaksanaan program Demapan dengan beberapa temuan menarik sebagai berikut (Rachman *et al.*, 2010) :

1. Dalam operasionalnya, pengembangan kelompok afinitas (KA) dan pembangunan ekonomi perdesaan membutuhkan dukungan lintas sektoral terkait dengan pembinaan dan pendanaan yang mencakup pengembangan kelembagaan, aktivitas pemberdayaan, dukungan sarana-prasarana dengan sasaran pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Prinsip dasar yang perlu mendapatkan penekanan adalah pemberdayaan kelompok miskin dan penguatan pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui revitalisasi dan transformasi struktural ekonomi pertanian dan perdesaan, sehingga tercipta kesempatan dan akses bagi semua pihak, khususnya penduduk miskin.
2. Keberhasilan, kemandirian, dan keberlanjutan program Demapan ini sedikitnya ditentukan oleh tiga syarat kecukupan yaitu: (1) kemampuan memperbaharui secara berkelanjutan kapasitas ekonomi pertanian dan perdesaan yang mencakup ketersediaan dan akses terhadap sumberdaya produktif, teknologi dan informasi terbaru, usaha ekonomi produktif, dan pengembangan pasar serta efisiensi pemasarannya; (2) kreatifitas menumbuhkembangkan diversifikasi usaha (pertanian dan non-pertanian) secara horizontal dan vertikal, serta penciptaan dan akses kesempatan kerja formal dan informal di tingkat desa dan diluar desa; dan (3) eksistensi dan keberlanjutan Demapan sangat ditentukan oleh pengembangan infrastruktur

publik dan kehadiran serta peran swasta dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial-kelembagaan dalam perspektif pemberdayaan dan penumbuhan ekonomi perdesaan.

3. Pengembangan Demapan kedepan agar difokuskan pada desa miskin (minimal 30% rumah-tangga perdesaan tergolong miskin) di seluruh Indonesia, sehingga keberhasilannya sepantasnya menjadi komitmen semua pihak. Dalam konteks ini dibutuhkan sinergi dan integrasi program JPS terpadu berbasis rumah-tangga dengan program pemberdayaan, serta sinergi dan adaptasi program pembangunan perdesaan dengan program pemberdayaan. Pada prinsipnya dibutuhkan sinergi dan integrasi program lintas sektoral dalam menjamin keberhasilan Demapan (pemberdayaan KA dan penumbuhan ekonomi perdesaan) dengan sasaran pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Secara umum beberapa upaya yang telah diupayakan di delapan desa Demapan, dengan derajat variasi yang beragam, diantaranya adalah: (1) revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan; (2) diversifikasi/transisi usaha pertanian subsisten kepada kegiatan informal non-pertanian di perdesaan; (3) revitalisasi/formalisasi kegiatan informal non-pertanian dengan sasaran peningkatan produktivitas dan tingkat upah; dan (4) perluasan kesempatan kerja keluar desa/kecamatan/kabupaten dengan sasaran perolehan tingkat upah/pendapatan yang lebih tinggi.

Peta jalan (1) dan (3) dapat dikategorikan sebagai jalan utama pemantapan ketahanan pangan/pengentasan kemiskinan; sementara itu peta jalan (2) dan (4) adalah jalan transisi dalam pemantapan ketahanan pangan/pengentasan kemiskinan. Keberhasilan pengembangan diversifikasi usaha dan kesempatan kerja ini akan sangat ditentukan oleh eksistensi dan kinerja kebijakan pemerintah daerah dan keberhasilan program Demapan, serta optimalisasi dan sinerginya dengan program utama Kementerian Pertanian saat ini yaitu PUAP

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

Salah satu program kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani dan perdesaan adalah program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan). Adapun tujuan dari PUAP (Pedoman Umum PUAP, 2009) adalah: (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai ialah : (1) berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa; (2) berkembangnya 10.000 GAPOKTAN/POKTAN yang dimiliki dan dikelola oleh petani; (3) meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan (4) berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Koordinasi Program dan Kelembagaan PUAP

Dalam pelaksanaan PUAP, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007 yang diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan SDM, Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian sebagai sekretaris. Di tingkat provinsi diketuai oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan sekretarisnya adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Di tingkat kabupaten diketuai oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Sekretaris adalah Kepala Penyuluhan Pertanian. Di tingkat kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai sekretaris.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan desa penerima program PUAP 2008 adalah : (1) data lokasi PNPM-Mandiri; (2) data Potensi Desa (Podes); (3) data desa miskin dari BPS; (4) data desa tertinggal dari Kementerian PDT. Penentuan lokasi PUAP 2009 didasarkan kepada data yang diperoleh dari hasil verifikasi lokasi PUAP yang telah dilakukan pada akhir tahun 2008 di 33 provinsi. Data yang digunakan berasal dari : (1) usulan desa calon lokasi Program PUAP tahun 2009 yang dikirimkan oleh berbagai pihak yang terkait, yakni aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah, (2) data sekunder meliputi data yang telah tersedia pada berbagai instansi, terutama Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada 33 provinsi sesuai dengan Permendagri No. 6/2008 yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri. Data tersebut digunakan untuk mengecek kesesuaian nomenklatur penamaan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.

Kelembagaan yang ada dalam program PUAP adalah : (1) Gapoktan sebagai penerima program; (2) Penyelia Mitra Tani (PMT) yang bertugas mensupervisi dan advokasi penyuluh pendamping dalam pengembangan usaha agribisnis perdesaan; (3) Penyuluh Pendamping yang bertugas membina Gapoktan

Kinerja Program PUAP

Dalam orasi pengukuhan profesor riset Sudaryanto (2009) menyatakan bahwa dari sisi konsepsi program PUAP sangat sejalan dengan prioritas program

untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi berbasis pertanian di daerah miskin. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu : (1) pemilihan desa dan kelompok sasaran belum sepenuhnya konsisten dengan konsep awal ; (2) aspek fasilitasi dan penguatan kegiatan usaha masih perlu ditingkatkan ; (3) perlu peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja eselon I.

Sementara itu hasil evaluasi pelaksanaan PUAP tahun 2008 (Sudaryanto *et al.*, 2009) menyimpulkan beberapa hal, yaitu : (1) masalah lokasi dimana proses penetapan desa lokasi PUAP terlambat atau tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan, usulan calon lokasi desa tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan; (2) Gapoktan yang dinilai maju umumnya berasal dari kelompok tani binaan program sebelumnya seperti Primatani, P4K, PIDRA, Desa Mandiri Pangan dan kelompok tani lainnya; (3) lembaga pendukung seperti PMT, penyuluh pendamping dan tim teknis kabupaten perannya dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan workshop, selain itu tidak didukung oleh peralatan yang memadai

Rivai *et al.* (2010) melakukan evaluasi PUAP 2009 dan menemukan beberapa permasalahan yang dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu : (1) kinerja input : calon lokasi desa penerima PUAP belum seluruhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk nomenklatur, hirarki wilayah, serta persyaratan Gapoktan dan pengurusnya. Belum dikembangkan lembaga keuangan mikro, pengurus Gapoktan, penyuluh pendamping dan PMT perlu ditingkatkan pemahaman dan ketrampilannya. Penggunaan dana PUAP dinilai belum berhasil dalam mengembangkan modal PUAP yang diberikan sebagai *seed capital*. (2) kinerja proses : terbatasnya dana operasional sehingga penyuluhan dari Tim Teknis kabupaten terbatas, peningkatan ketrampilan penyuluh pendamping tidak maksimal karena kurangnya pelatihan, pengembangan keuangan di gapoktan tidak maksimal, rata-rata gapoktan menerapkan bunga pinjaman dari 1 sampai 2 persen perbulan dan belum ada pembukuan keuangan yang baku di tingkat gapoktan. (3) kinerja output : hampir seluruh gapoktan mengusahakan kegiatan simpan pinjam, perguliran dana tergantung dari aturan main yang disepakati dimana gapoktan yang menerapkan cicilan bulanan dana bergulirnya lebih cepat dibandingkan gapoktan yang menerapkan pembayaran hutang diakhir usaha. Peningkatan skala usaha budidaya sulit dilakukan karena keterbatasan lahan dan skala usaha pengolahan terhambat pengembangannya karena adanya permasalahan dalam pemasarannya.

Hasil evaluasi awal ini mengindikasikan kompleksitas permasalahan implementasi PUAP. Terdapat kompleksitas dalam pemilihan lokasi dan implementasi konsepsi program dalam waktu cepat dan skala luas. Dalam rangka efektifitas pemanfaatan dana pembangunan dan efektifitas kinerja program pemberdayaan dinilai strategis untuk melakukan optimalisasi program pemberdayaan melalui sinergi program PUAP dengan program Demapan.

SINERGI PROGRAM PUAP DENGAN DEMAPAN

Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka upaya yang perlu dilakukan adalah menciptakan kesempatan kerja atau usaha yang berkelanjutan. Banyak cara yang bisa dilakukan, antara lain adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan aktifitas spesifik lokasi. Fakta empiris menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang ada umumnya mempunyai kesamaan konsepsi dan yang berbeda hanya institusi pelaksanaannya. Kondisi ini menyebabkan kinerja dampak program pemberdayaan tidak optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut usaha awal yang dilakukan adalah koordinasi yang dimulai dalam satu institusi. Khususnya di Kementerian Pertanian koordinasi dan sinkronisasi disarankan dimulai dari mensinergikan Program Usaha Pengembangan Agribisnis (PUAP) dengan program Desa Mandiri Pangan (Demapan). Penggabungan ini didasari dari kesamaan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan dengan sasaran program adalah kelompok tani.

Menggabungkan program PUAP dengan Demapan tidak akan menabrak rambu-rambu yang sudah disepakati. Program Demapan dalam tataran operasional terkait dengan upaya memantapkan program pemberdayaan kelompok miskin (kelompok afinitas), mensinergikan dan mengintegrasikannya dengan pembangunan ekonomi perdesaan. Dengan demikian pembangunan Demapan membutuhkan dukungan lintas sektoral dalam pemberdayaan kelompok dan pembangunan di tingkat desa. Demapan merupakan program yang berbasis desa dalam artian program yang ada didesa tersebut bisa dikaitkan atau disinergikan dengan program Demapan. Selain itu dalam penentuan desa penerima program, dalam satu tahun desa yang masuk kategori desa mandiri sebanyak 300-400 desa, dan penambahan program baru Demapan hanya sekitar 400 desa. Artinya jumlah keseluruhan desa yang menerima program Demapan tidak mencapai 10 persen dari desa yang akan mendapatkan program PUAP yang selama setahun rata-rata 10.000 desa.

Sinergi dan integrasi PUAP dengan Demapan perlu mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu : (1) diawali dengan sinergi data, pemilihan desa penerima program; (2) penataan internal kelembagaan program; (3) pemantapan pengembangan infrastruktur dengan sasaran akselerasi pengentasan kemiskinan; dan (4)antisipasi implementasi sinergi kedua program dilapangan.

1. Demapan sebagai Basis Lokasi Program

Semua usulan calon lokasi desa PUAP 2009 yang disampaikan ke Sekretariat Pelaksana PUAP Pusat, belum seluruhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk nomenklatur, hirarki wilayah dan keterkaitannya dengan desa lokasi PUAP tahun 2008. Akibatnya Kelompok Kerja Identifikasi

Desa harus bekerja ekstra termasuk melakukan verifikasi kembali ke daerah yang memakan waktu dan tenaga cukup banyak (Rivai *et al.*, 2009). Kedepan antisipasi lokasi PUAP dalam perspektif sinerginya dengan Demapan dapat mempertimbangkan beberapa opsi :

a. Melanjutkan di Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan yang sudah memasuki tahap kemandirian (tahun ke 4) diharapkan dapat menggerakkan sendiri aktifitas kelompoknya. Pada tahapan ini, desa sudah memiliki Gabungan Kelompok Afinitas, Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tim Pangan Desa (TPD). Tetapi untuk tenaga pendampingan sudah tidak berlaku lagi.

Program PUAP dapat melibatkan desa ini dengan alasan :

- (i) Desa ini sudah memiliki kelompok afinitas yang sudah saling mengenal satu sama lain selama empat tahun. Setiap tahunnya selalu ada kegiatan dan pertemuan rutin sehingga ikatan emosional untuk masing-masing anggota sudah terbangun. Artinya untuk membentuk kelompok tani yang menjadi kaharusan agar dapat memperoleh bantuan program PUAP tidak menjadi masalah ;
- (ii) Selain itu desa ini sudah ada lembaga formal yang terbentuk seperti LKD dan TPD. Adapun lembaga-lembaga tersebut intinya adalah membantu anggota kelompok afinitas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lembaga ini bisa memberikan masukan tentang calon penerima dan jenis kegiatan yang akan dibiayai PUAP ;
- (iii) Untuk memperkuat permodalan kelompok. Meskipun sudah dapat dana bantuan tetapi pada hakekatnya dana tersebut relatif kecil dan terbatas dalam upaya mendukung peningkatan skala ekonomi atau usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- (iv) Dana PUAP dapat juga dipergunakan untuk menggaji satu tenaga pendamping. Tenaga tersebut bisa dari tenaga pendamping sebelumnya yang habis masa kontraknya (4 tahun) atau dari tenaga baru. Intinya tenaga yang dipilih dapat menggerakkan serta memotivasi anggota kelompok dan menyampaikan informasi atau aktifitas kelompok dengan masyarakat di luar kelompok baik dalam desa maupun diluar desa.

b. Mendukung Desa Binaan Desa Mandiri Pangan

Program desa mandiri pangan dilaksanakan dalam 4 tahun (dengan 4 tahapan) dan diharapkan desa tersebut bisa membimbing desa lain atau dalam program Demapan dikenal dengan nama Gerakan Mandiri Pangan. Pada saat desa mandiri atau desa inti membina desa lain atau desa plasma, program PUAP dapat diikutsertakan untuk membina desa plasma tersebut. Alasannya untuk membangun dan mengembangkan lembaga yang ada di masyarakat desa tidak mudah,

dibutuhkan proses yang memakan waktu cukup lama. Bagi masyarakat desa agar gampang untuk membentuk sebuah kelompok dan mengikat kekuatan moral satu sama lain, harus diberikan contoh. Desa mandiri pangan dapat dijadikan contoh untuk desa lain, sehingga tujuan dari program PUAP dapat diwujudkan.

c. Berdasarkan Pemilihan Dinas Kabupaten

Pemilihan desa dengan cara ini tujuannya untuk menghindari pemilihan desa yang tidak tepat sasaran. Apabila program PUAP ingin menentukan sendiri desa penerima program, terlebih dahulu calon desa tersebut dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nama-nama desa tersebut kemudian dikirim ke provinsi, pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan seleksi desa penerima program. Nama-nama desa yang sudah terpilih didiskusikan kembali antara pusat dan DPR di Kementerian Pertanian sesuai dengan kuota yang telah disepakati.

2. Penataan Kelembagaan Internal Program

Apabila pilihan desa adalah melanjutkan desa binaan Demapan, maka disarankan kelembagaan desa yang terlibat dalam program ini adalah gabungan kelompok afinitas, tim pangan desa, lembaga keuangan desa, penyuluh pendamping, penyelia mitra tani dan kelompok tani baru yang terbentuk akibat adanya program PUAP.

Dana program PUAP dapat juga dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan internal dalam bentuk pelatihan PRA dan pelatihan teknis pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tenaga pendamping. Dana juga dapat dialokasikan untuk peningkatan pemahaman sistem ketahanan pangan bagi Tim Pangan Desa (TPD), pelatihan pengelolaan keuangan bagi Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan pelatihan pengelolaan data base bagi aparat pengelola Demapan.

a. Kelompok Afinitas sebagai basis Gapoktan

Kelompok Afinitas (KA) dibentuk berdasarkan pemilihan keluarga miskin minimal 30 persen dari jumlah penduduk desa. Sementara Gapoktan dibentuk berdasarkan gabungan kelompok tani yang sudah ada atau bentukan baru dari embrio kelompok arisan, kelompok kerja gotong royong, sambatan atau mapalus. Pelaksanaan program akan lebih berhasil apabila kelompok yang mendapatkannya merupakan kelompok yang sudah lama terbentuk.

KA selama masa empat tahun mengalami peningkatan. Hal ini direpresentasikan dari bertambahnya jumlah anggota atau terbentuknya kelompok afinitas baru misalnya kelompok khusus untuk ibu-ibu. Selama mengikuti program Demapan telah terjadi diversifikasi sumber penghasilan, seperti mengusahakan produk-produk turunan pertanian (kripik, kue atau makanan tradisional lainnya)

atau mengusahakan ternak sapi, kambing dan ayam. Pola pikir anggota kelompok mulai merasakan manfaat hidup berkelompok, sudah terasah dalam mengeluarkan pendapat dan sudah mulai terbiasa dengan mekanisme perbankan.

KA mulai mendapatkan pinjaman modal usaha umumnya ditahun kedua. Dengan adanya dana PUAP maka modal tersebut bisa digunakan untuk pelatihan didalam pembukuan internal KA dengan tujuan semua anggota tahu perkembangan dana kelompok. Pelatihan usaha seperti mengatasi serangan hama penyakit tanaman dan ternak, adopsi teknologi produk olahan, pengemasan produk dan pengembangan diversifikasi serta jejaring pemasaran

b. Petugas Pendamping = PMT

Petugas pendamping dan PMT (Penyelia Mitra Tani) pada intinya mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai pembina dan mediasi antara KA dan Gapoktan dengan pihak yang terkait dengan program pemberdayaan. Dalam perekrutan juga sama yaitu mengambil tenaga profesional dan harus berdomisili dilingkungan daerah yang dibina. Yang menjadi pembedanya adalah luasan daerah binaannya, yaitu petugas pendamping basisnya desa dan PMT basisnya kabupaten.

Petugas pendamping waktunya sampai pada tahap mandiri atau empat tahun. Dalam pelaksanaannya meskipun desa mandiri pangan sudah memasuki tahap mandiri, tetapi dalam kenyataannya belum sepenuhnya mandiri. Artinya peranan petugas pendamping masih dibutuhkan untuk membina kelompok afinitas. Dengan adanya dana PUAP diharapkan petugas pendamping diberikan kesempatan lagi untuk melakukan pendampingan sampai desa tersebut benar-benar mandiri dan berkelanjutan.

c. Lembaga Keuangan Desa = Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Desa di Desa Mandiri Pangan dan Lembaga Keuangan Mikro di PUAP sama-sama merupakan hasil akhir dari kegiatan dan lembaga ini diharapkan bisa mengelola keuangan kelompok afinitas maupun gapoktan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya program Demapan yang masuk tahap kemandirian sudah mendirikan lembaga keuangan desa dan masih mempercayakan pengelolaan keuangan di dalam kelompok. Pemanfaatan dana di kelompok afinitas (Demapan) secara umum untuk pinjaman usaha di bidang perdagangan dan pengadaan saprodi. Dengan adanya dana program PUAP diharapkan dana tersebut masuk kedalam lembaga keuangan desa sebagai tambahan modal usaha anggota danantisipasi pengembangan usaha kelompok agar lebih beragam

d. Tim Pangan Desa

Lembaga Tim Pangan Desa menempati fungsi yang strategis dalam pembangunan program Demapan. TPD memiliki fungsi koordinasi dalam pembangunan wilayah desa, mengintegrasikan kegiatan pembangunan desa

dengan program Demapan, serta mengawasi kelompok afinitas dan menggantikan fungsi tenaga pendamping. Tugas tenaga pendamping antara lain memberikan motivasi dan fasilitasi inovasi dalam menggerakkan usaha, dan ikut terlibat dalam memasarkan produk-produk olahan kelompok afinitas. Tim Pangan Desa beranggotakan unsur pamong desa, BPD, kelompok afinitas, kader PKK, tokoh masyarakat dan penyuluh.

Dalam pelaksanaannya tidak semua desa memiliki TPD dengan kinerja seperti yang diharapkan. Dengan adanya bantuan dana PUAP diharapkan dapat mendukung operasional dan kegiatan TPD sehingga dapat berperan secara efektif dalam mendukung program pemberdayaan dan mensinergikannya dengan pembangunan pertanian dan ekonomi perdesaan.

3. Efektivitas Program Melalui Pengembangan Infrastruktur

a. Peningkatan Ketahanan Pangan

Sistem ketahanan pangan merupakan kegiatan yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Sistem ketahanan pangan ini terdiri dari tiga subsistem yaitu : subsistem ketersediaan pangan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi. Dana PUAP bisa masuk diantara tiga subsistem tersebut.

Subsistem ketersediaan pangan terdiri dari dua bagian, yakni melalui peningkatan produksi dan akses pangan melalui kegiatan on farm, off farm dan non farm. Diversifikasi produksi pangan meliputi upaya pengembangan teknologi, pengolahan dan pasca panen, serta pengembangan pangan lokal. Disamping itu adalah pelaksanaan intensifikasi usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain. Dalam kelompok afinitas tingkat tuna-kisma umumnya relatif tinggi, demikian juga dengan luas pemilikan lahan sangat terbatas. Mengingat keterbatasan ketersediaan dan akses lahan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan tidak ada pilihan lain kecuali perluasan basis bidang usaha yang mencakup kegiatan off-farm dan non-farm, termasuk UKM non-pertanian.

Sedangkan bagian kedua adalah peningkatan usaha pemenuhan cadangan pangan keluarga, masyarakat desa dan wilayah melalui pengembangan lumbung pangan keluarga dan ditingkat desa. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang bertujuan untuk menyeimbangkan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

Sub sistem distribusi pangan mencakup keterjangkauan sumber pangan dan keterjangkauan dari segi harga. Bagi desa yang jauh dari lokasi pasar desa/kecamatan/kabupaten maka masyarakat akan mendapatkan pangan dengan

harga yang lebih mahal, karena ada biaya transportasi. Dari sisi harga, bagi masyarakat dengan pendapatan keluarga yang terbatas akan menghadapi kesulitan akses pangan, karena keterbatasan daya beli. Untuk mengatasi ini program PUAP dapat membantu dalam memudahkan akses fisik terhadap pangan, perbaikan efisiensi pemasaran, dan peningkatan daya beli masyarakat dalam perspektif pemantapan akses ekonomi terhadap pangan.

Sub sistem konsumsi dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan pekarangan dan konsumsi sumber pangan lokal. Dana PUAP dapat dipergunakan untuk mendukung dan meningkatkan sosialisasi program B3A (berimbang, bergizi, beragam dan aman) serta diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan umbi-umbi lainnya sebagai bahan pangan pokok. Apabila ini terus digiatkan tidak menutup kemungkinan diversifikasi pangan dan ketergantungan akan beras dapat dieliminir.

b. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan cara melakukan diversifikasi usaha dalam rangka membuka lapangan kerja. Diversifikasi usaha dianggap penting karena peningkatan produksi tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya penguasaan dan akses sumberdaya lahan. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam diversifikasi usaha adalah masalah memasarkan produk tersebut.

Permasalahan yang dinilai mendesak untuk dipecahkan adalah terkait dengan pasar komoditas/produk hasil usaha KA dan peningkatan efisiensi pemasarannya. Permasalahan ini mengemuka di semua desa Demapan, walaupun dengan derajat permasalahan yang berbeda. Sebagian KA dinilai telah berhasil mengembangkan kegiatan kreatif terkait dengan pengembangan produk berbasis komoditas pangan lokal, dan usaha industri kecil non pertanian, namun terhambat dalam pengembangan dan perluasan pemasarannya. Gerakan pemasaran secara kolektif oleh KA belum dapat diwujudkan secara menyeluruh dan efektif. Dukungan pemerintah bersama-sama dengan swasta sangat dibutuhkan dalam membantu perluasan pemasaran produk yang telah mampu dikembangkan dengan berhasil oleh beberapa KA di lapangan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjajaki jejaring pemasaran dengan pihak swasta terkait, atau membangun berbagai kemungkinan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam menggalang pemasaran produk pertanian/non-pertanian.

c. Pengembangan Infrastruktur dan Peran Swasta

Pengembangan infrastruktur merupakan kebijakan lintas sektoral yang akan berperan dalam mengurangi biaya transaksi dalam pasar input, proses budidaya/usaha, dan pasar output. Pengembangan infrastruktur ini sangat tergantung pada peran dan kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), namun khusus untuk pengembangan infrastruktur desa Demapan tentunya peran

pemerintah daerah sangat diharapkan. Kinerja dan permasalahan pengembangan infrastruktur dan peran swasta ini relatif sama antar desa program Demapan. Infrastruktur perdesaan, khususnya sektor pertanian sangat mendesak untuk dibenahi. Dalam kondisi krisis ekonomi global yang terjadi saat ini, harapan dukungan pendanaan dari luar negeri dinilai relatif kecil, sehingga komitmen pemerintah, khususnya pemerintah daerah adalah sangat menentukan.

Pembenahan infrastruktur pertanian yang mendesak untuk segera dibenahi adalah perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani. Ditingkat KA yang mendesak dibutuhkan adalah terkait dengan sarana fisik lumbung pangan dan ketersediaan sarana-prasarana terkait dengan pasca-panen dan pengolahan produk, serta pengembangan infrastruktur kelembagaan terkait dengan pemasaran produk yang dihasilkan KA. Di desa Demapan yang mengalami hambatan dalam pengembangan jaringan irigasi agar diprioritaskan untuk memperoleh program JIUT dan JIDES. Dalam konteks pengembangan infrastruktur ini peran program lintas sektoral menjadi sangat penting, dan seyogyanya Demapan mendapatkan prioritas yang semestinya. Dalam konteks ini, program PUAP dapat berperan positif dalam pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan melalui penggalangan kerjasama pemerintah, swasta dan LSM.

4. Uji Coba Pelaksanaan Sinergi Program PUAP dengan Demapan

Kritik umum terhadap penanggulangan kemiskinan selama ini adalah berkurangnya pemahaman karakteristik penduduk miskin, tidak mengacu pada permasalahan riil yang dihadapi masyarakat miskin, berbasis individu dan tidak berkelanjutan. Koreksi pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan beberapa aspek strategis (Mubyarto, 2002; Santosa *et al.*, 2003; Adiyoga dan Hermiati, 2003) sebagai berikut : (1) indikator keberhasilan individu perlu dikomplemen dengan prestasi kelompok dan masyarakat; (2) paradigma penanggulangan kemiskinan dengan pengakuan terhadap potensi partisipatif dan modal sosial kaum miskin untuk mengembangkan diri; (3) menumbuhkan sendiri prinsip transparansi dan akuntabilitas ditingkat masyarakat desa; (4) melakukan reposisi peran pihak-pihak luar desa dari agen pembangunan menjadi fasilitator pemberdayaan; (5) percepatan transformasi struktural ekonomi perdesaan melalui pengembangan strategi pertumbuhan inklusif sektor pertanian dan perdesaan; dan (6) kewenangan menentukan sendiri aktivitas penanggulangan kemiskinan dan meniadakan ego-sektoral yang bersifat tumpang tindih, tidak efektif dan kurang efisien.

Hal yang senada dikemukakan oleh Syahyuti (2007) dimana keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan apabila ada pembenahan di sistem administrasi dan birokrasinya. Untuk bisa mengatasi ego sektoral dan tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan khususnya di Kementerian Pertanian bisa dimulai dengan melaksanakan kegiatan PUAP di lokasi Demapan yang sudah masuk tahap kemandirian. Kedua program ini

mempunyai kesamaan dalam hal penyediaan dana yang akan dipergunakan untuk kegiatan on farm, off farm dan non farm.

Awalnya kegiatan PUAP dilaksanakan di Badan Sumber Daya Manusia, setelah adanya reorganisasi dilingkup Kementerian Pertanian, maka program PUAP mulai tahun 2011 dibawah tanggungjawab Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam uji coba sinergitas program PUAP dalam mendukung Desa Mandiri Pangan tetap di dibawah kendali Badan Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan setiap tahun melakukan evaluasi terhadap desa yang sudah masuk dalam tahap kemandirian yang akan dijadikan desa inti yang akan membina tiga desa yang berdekatan. Nama-nama desa yang sudah layak untuk dijadikan desa inti bisa dipergunakan sebagai basis desa yang akan menerima program PUAP. Dana PUAP bisa dipergunakan untuk (1) membantu usaha kelompok afinitas dalam mengembangkan jenis usaha (diversifikasi), kapasitas usaha atau memperluas daerah (jejaring) pemasarannya; (2) dana PUAP diperuntukkan bagi masyarakat desa inti yang belum menjadi kelompok afinitas; (3) Tenaga Penyelia Mitra Tani (PMT) bisa memfungsikan kembali tenaga pendamping yang sudah tidak bekerja lagi di program Demapan; (4) perbaikan kapasitas produksi pertanian dan perdesaan dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan (5) pengembangan infrastruktur pertanian/perdesaan dalam memantapkan dan menjaga keberlanjutan investasi perdesaan.

PENUTUP

Program pemberdayaan Demapan dan PUAP memiliki banyak kesamaan, antara lain berbasis kelompok dan perdesaan, mendapatkan modal usaha untuk pengembangan usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping. Program Demapan dilakukan secara bertahap (sejak tahun 2006) dan telah mencapai tingkat kemandirian, sementara program PUAP relatif baru, sehingga wacana mensinergikan PUAP dengan Demapan dinilai relevan.

Mendirikan kelembagaan bukanlah pekerjaan yang mudah baik dari sisi pembentukan awal maupun dari sisi menjalankan kelembagaan itu sendiri. Dibutuhkan waktu untuk bisa memantapkan eksistensi kelompok miskin dan kelembagaan terkait lainnya dengan sasaran pemberdayaan masyarakat miskin dan menumbuhkan ekonomi perdesaan. Mensinergikan program PUAP dengan Demapan merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan sinergitas program PUAP dalam mendukung Demapan tetap dalam kendali Badan Ketahanan Pangan, namun kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan efektifitas penggunaan dana PUAP dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian. Dana program PUAP tersebut dapat dipergunakan

untuk memantapkan tingkat kemandirian dan memfasilitasi desa binaan Demapan dengan sasaran pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Agar kegiatan sinergi kedua program ini menjadi maksimal, maka peran BPTP sebagai sekretaris kegiatan PUAP di provinsi dapat dioptimalkan fungsi pengawasannya.

Demapan bisa dikategorikan sebagai salah satu program yang akan mensukseskan program PUAP, dengan cara melanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa Demapan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya yang ada di kelompok afinitas saja, bisa juga kegiatan-kegiatan diluar kelompok afinitas seperti pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan. Dengan adanya koordinasi kegiatan, pembangunan lintas sektoral, serta peningkatan peranan pemerintah, swasta dan LSM, maka akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoga, IDDBM dan E. Hermiati. 2003. Pola Nafkah Lokal : Acuan Mengkaji Kemiskinan di Era Otonomi Daerah (Kasus Nusa Tenggara Timur) Jurnal Ekonomi Rakyat Artikel Tahun 1 No. 12 Febuari 2003. Jakarta. www.ekonomirakyat.org.
- Bahreïn,S. 2010. Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat : Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8 No 2 Juni 2010 Hal : 133-149. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- BKP. 2009. Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2008. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Deptan Press. Jakarta.
- Henderson, W. 2007. Rural Urban Inequality in Asia. CAPSA Flash, Volume 5/9 September 2007. UNESCAP-CPSA. Bogor.
- IFPRI and ADB. 2007. Agricultural and Rural Development for Reducing Poverty in Asia: In Pursuit of Inclusive and Sustainable Growth. IFPRI, Washington D.C. USA and ADB, Metro Manila.
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Perdesaan*, P3PK UGM Yogyakarta, 1984.
- Mubyarto. 2002. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel tahun I No. 7 November 2002. Jakarta. www.ekonomirakyat.org
- Rachman,B., IW.Rusastra, MH.Sawit, E.Basuno, EM.Lakollo, B. Prasetyo, H. Tarigan, Sunarsih, V. Darwis dan A. Askin. 2010. Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian di Tingkat Rumah Tangga dan Wilayah Perdesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor

- Rahayu, B.A. 2006. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Iskandar Institute
- Rivai, R.S., K. Suradisastra, DK. Sadra, KM. Noekman, W.K. Sejati, JF. Sinuraya, NK. Agustin, Y. Supriyatna, J. Hestina, Y. Marisa dan B. Wiryono. 2010. *Laporan Hasil Penelitian Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2010*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Rusastra I W., Supriyati, W.K. Sejati dan Saptana 2008, *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan : Analisis Program Ketahanan Pangan dan Desa Mandiri Pangan*. Laporan Hasil Penelitian. Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta
- Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Santosa, H., D.G. Hidayat dan P. Indrayono. 2003. *Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di DIY*. Jurnal Ekonomi Rakyat Artikel Tahun II No. 2 April 2001. Jakarta. www.ekonomirakyat.org
- Sudaryanto, T. 2009. *Akselerasi Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan : Revitalisasi Peran Sektor Pertanian*. Orasi Pengukuhan Profesor Riset. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Sudaryanto, T., R. Rivai, M. Rachmat, H. Mayrowani, H. Supriyadi, NK. Agustin., JF. Sinuraya, KM. Noekman, J. Situmorang, Y. Marisa, M. Iqbal, Waluyo, V. Darwis, C. Muslim, Y. Supriyatna RE. Manurung, dan R. Aldilah. 2009. *Laporan Hasil Penelitian Penentuan Lokasi dan Evaluasi Kinerja Serta Dampak Awal Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Syahyuti. 2007. *Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Dalam Kegiatan Pembangunan Pertanian : Perbandingan Kegiatan P4K, PIDRA, P4MI dan Primatani*. Forum Agro Ekonomi Volume 25 N0.2 Desember 2007. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Timer, C.P. 2006. *The Structural Transformation in Historical Perspective : Lesson From Global Pattern and Divergent Country*.